

KETERSEDIAAN DAN PROFITABILITAS PENGUSAHAAN TRAKTOR DI JAWA BARAT, SUMATERA UTARA DAN LAMPUNG

Victor T. Manurung, Budiman Hutabarat, Supriyati, dan Sri Hery Susilowati¹⁾

Abstrak

Ketersediaan traktor di daerah penelitian meningkat terus. Walaupun demikian, ketersediaan traktor belum memenuhi kebutuhan. Peningkatan jumlah traktor itu merupakan tuntutan kebutuhan tenaga kerja, bukan menggeser tenaga kerja manusia sehingga keluar dari pertanian. Penggunaan traktor sudah bersifat umum di kalangan petani dengan mobilitas antar daerah yang relatif tinggi. Kepadatan dan intensitas penggunaan traktor di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan di kedua daerah penelitian lainnya. Diduga hal itu berkaitan erat dengan ketersediaan kesempatan kerja, lamanya traktor dikenal oleh petani dan kondisi pertanian di daerah yang bersangkutan. Aspek-aspek itu lebih mendorong penggunaan traktor yang lebih intensif di Jawa Barat dibandingkan dengan di kedua daerah lainnya. Perkembangan pemilikan traktor tidak hanya untuk digunakan dalam usahatani sendiri, tetapi juga untuk disewakan kepada petani lain. Secara finansial pengusahaan jasa traktor menguntungkan para pelakunya. Dampak positif pengusahaan traktor tidak hanya bagi usahatani dan pengusaha jasa traktor, tetapi juga membangkitkan kesempatan kerja baru di pedesaan. Upaya traktorisasi perlu digalakkan untuk mengembangkan pertanian dan hal itu perlu didukung oleh kebijakan pemerintah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggunaan traktor dalam usahatani sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Namun, dalam proses perjalanannya mengalami berbagai hambatan sehingga baru berkembang sekitar tahun 1970. Penggunaan traktor itu tidak hanya berkembang di Jawa, melainkan juga ke luar Jawa, seperti Sumatera dan Sulawesi Selatan. Bahkan, akhir-akhir ini penggunaan traktor untuk pengolahan lahan, tidak hanya untuk sawah, tetapi juga untuk lahan tegalan.

Perkembangan penggunaan jasa traktor itu, tentu karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan alat itu. Bagyo (1984) menunjukkan bahwa produksi per hektar di Jawa Barat dengan menggunakan traktor lebih tinggi daripada produksi tanpa menggunakan traktor. Juga, Simatupang, dkk. (1989) menunjukkan bahwa mekanisasi pengolahan lahan dapat meningkatkan produksi di Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara. Selain itu,

dengan menggunakan traktor, periode kegiatan pengolahan lahan menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis. Adanya peningkatan produksi pertanian yang menyebabkan Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984 tidak lepas dari dukungan penggunaan traktor tersebut.

Kalau diperhatikan lebih seksama, sebenarnya pihak yang berkepentingan dalam efisiensi pemanfaatan jasa traktor itu tidak hanya pihak pengguna, tetapi ada juga pihak lain. Secara garis besar ada dua pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan traktor itu, yakni petani sebagai pengguna jasa traktor dan pemilik/pengusaha traktor. Peranan pemilik/pengusaha traktor ini dapat dilihat dari sistem pengadaan atau pelayanan jasa traktor itu. Tentu, hal ini dipengaruhi pula oleh keuntungan yang diperoleh mereka dari usaha itu.

¹⁾ Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Dilihat dari sisi pengguna (usahatani), manfaat penggunaan traktor itu cukup jelas dan informasinya sudah banyak diketahui. Profil tentang pemilik/pengusaha traktor belum banyak dianalisis terutama sejak tahun 1980-an. Tulisan ini mencoba mengemukakan bagaimana ketersediaan traktor, sistem dan motivasi pengusahaan traktor itu dilihat dari segi pemilik/pengusaha traktor. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh pemilik atau pengusaha dalam pengelolaan traktor itu juga akan dikemukakan. Informasi ini penting dalam penentuan kebijakan pengadaan jasa mekanisasi pertanian, dimana aspek sosial ekonomi pertanian kurang diperhatikan selama ini. Baharsjah (1991) menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam sistem pengadaan jasa alat mesin pertanian antara lain adalah kemampuan memberikan keuntungan bagi pengusaha/perorangan yang menyediakan jasa dan tidak menimbulkan monopoli penyediaan jasa tersebut.

Tujuan Penelitian

Untuk penentuan kebijakan yang tepat harus dilandasi oleh tersedianya informasi dasar. Informasi sosial ekonomi penggunaan traktor dalam usahatani, terutama dilihat dari sisi pemilik dan atau pengusaha jasa traktor masih terbatas. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur profitabilitas pengusahaan traktor dan kaitannya dengan motivasi pengusahaannya.

METODA PENELITIAN

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan di tiga propinsi, yakni propinsi Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara pada tahun 1990. Kabupaten yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah kabupaten yang menggunakan jasa traktor terbanyak, yang diukur dari jumlah traktor yang ada di daerah itu. Prosedur yang sama dilakukan untuk memilih kecamatan-kecamatan dari kabupaten terpilih. Tujuan dari tehnik pemilihan lokasi seperti itu agar sumber informasi tentang penggunaan traktor menjadi lebih lengkap. Penyebaran lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

Responden sebagai sumber informasi/data terdiri dari pemilik/pengusaha traktor, pengemudi (operator), agen, buruh tani, pengguna traktor (petani) dan pemilik bengkel atau penjual alat-alat

pertanian. Ketua kelompok tani, penyuluh pertanian lapang (PPL) dan pimpinan desa, baik pimpinan formal maupun informal juga ikut sebagai sumber informasi/data dalam penelitian ini.

Tabel 1. Penyebaran lokasi penelitian diketiga propinsi Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara.

Propinsi	Kabupaten	Kecamatan
Jawa Barat	1. Karawang	- Cilamaya
		- Cikampek
	2. Indramayu	- Widasari
		- Karang Ampel
	3. Majalengka	- Kadipaten
		- Sumberjaya
4. Ciamis	- Lakbok	
	- Pangandaran	
	- Pangandaran	
Lampung	1. Lampung Selatan	- Palas
		- Gadingrejo
	2. Lampung Tengah	- Trimulyo
		- Jabung
Sumatera Utara	1. Asahan	- Meranti
		- Tanjung Tiram
	2. Tapanuli Utara	- Tarutung
		- Porsea
	3. Deli Serdang	- Lumban Julu
		- Tebing Tinggi

Data dan Metoda Analisis

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, data primer dan data sekunder, baik berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Data primer dicatat dalam daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Data primer lainnya yang tidak dapat ditampung dalam daftar pertanyaan dicatat dalam catatan harian. Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait.

Metoda analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang diformulasikan dalam tabel-tabel. Analisis "time series" juga dilakukan sepanjang data tersedia. Analisis kuantitatif tersebut dilengkapi dengan analisis kualitatif. Kemudian dilakukan analisis komparatif antar daerah untuk memperoleh penjelasan fenomena yang terjadi.

KETERSEDIAAN TRAKTOR

Mekanisasi dalam usahatani di Indonesia telah dikenal cukup lama, yakni sekitar tahun 1950-an. Namun pada tahap permulaan introduksi mekanisasi itu, dalam hal ini penggunaan traktor mengalami hambatan sehingga berjalan dengan lambat.

Baharsjah (1991) menyatakan bahwa lambatnya perkembangan traktor itu antara lain disebabkan oleh traktor dengan ukuran yang tepat untuk skala produksi kecil yang mampu mengolah tanah lebih baik belum ditemukan pada saat itu.

Pada tahun 1970, penggunaan traktor dalam usahatani di Indonesia mulai berkembang. Misalnya, sejak tahun 1975 traktor tangan, walaupun jumlahnya tidak diketahui telah digunakan di sawah Jawa Barat dan Bali, terutama di pantai Utara Jawa (Bagyo, 1984). Terlepas dari keunggulan traktor itu dibandingkan dengan jenis tenaga kerja pengolahan lainnya, perkembangan penggunaan traktor itu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi pertanian lainnya, seperti penemuan bibit unggul padi yang genjah dan pengaturan irigasi yang menuntut periode pengolahan lahan yang lebih singkat. Kapasitas dan mobilitas penggunaan traktor antar daerah yang tinggi menyebabkan kebutuhan tenaga kerja yang mendesak dapat dipecahkan.

Penggunaan traktor meningkat terus terutama di daerah persawahan, tidak terkecuali di daerah yang padat penduduknya. Dalam phase perkembangan penggunaan traktor yang pesat di daerah yang disebut terakhir ini, penggunaan traktor itu sempat menimbulkan polemik antara yang pro dan kontra. Salah satu permasalahan yang dikhawatirkan sebagai akibat dari penggunaan traktor itu adalah tergesernya tenaga kerja pengolahan tanah dari usahatani sehingga terjadi pengangguran di pedesaan. Sinaga (1978) menyatakan bahwa dampak penggunaan traktor itu tidak hanya menggeser tenaga kerja dari usahatani, tetapi juga mengakibatkan distribusi pendapatan petani akan semakin timpang. Simatupang, dkk. (1989) memperlihatkan bahwa penggunaan traktor secara implisit bukan merupakan substitusi bagi tenaga manusia, melainkan saling membutuhkan. Hasil penelitian

yang disebut terakhir mengangkat kasus di Lampung dan Sumatera Utara. Kedua daerah ini termasuk daerah yang relatif jarang penduduknya. Perkembangan jumlah traktor di ketiga propinsi Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara akan dikemukakan sebagai berikut.

(a) Laju Pertumbuhan Traktor

Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang pertama di Indonesia yang menggunakan traktor dan berkembang hingga kini. Traktor yang berkembang di daerah itu adalah jenis traktor tangan. Jumlah traktor di daerah itu dapat dilihat pada Tabel 2. Dari tabel itu dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah traktor terdapat di kabupaten dataran rendah pantai Utara Jawa, seperti Karawang dan Indramayu. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi, dimana daerah pantai Utara Jawa merupakan sentra produksi padi yang sering kekurangan tenaga kerja pengolahan tanah dibandingkan dengan daerah Jawa Barat lainnya.

Selain itu dari Tabel 2 juga terlihat bahwa laju pertumbuhan jumlah traktor di Jawa Barat sekitar 6 persen per tahun, kecuali di Kabupaten Ciamis yang jauh lebih tinggi dari situ. Kabupaten Ciamis dan Majalengka merupakan daerah dataran tinggi. Rendahnya jumlah traktor di kedua daerah tersebut di atas erat kaitannya dengan kondisi pertanian yang bukan suatu hamparan dataran rendah yang luas seperti di pantai Utara Jawa. Suatu hal yang menarik untuk dicatat dari kondisi di kabupaten Ciamis adalah keinginan petani yang cukup besar untuk menggunakan traktor yang tercermin dari laju pertumbuhan yang cukup besar, yaitu 29 persen per tahun. Ini merupakan indikasi bahwa penggunaan traktor untuk mengolah tanah sangat diminati oleh petani, tidak hanya di dataran rendah

Tabel 2. Jumlah traktor tangan di propinsi Jawa Barat, 1984 – 1986 dan 1989.

Kabupaten	1984	1985	1986	1989	Laju pertumbuhan (%)
					1984 – 1989
Karawang	969	1.071	1.333	1.333	6
Indramayu	1.311	1.419	1.486	1.759	6
Majalengka	171	214	233	233	5
Ciamis	50	51	77	207	29
Jawa Barat	5.257	5.751	6.485	7.078	6

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Jawa Barat, 1990. (diolah).

Keterangan: Dalam menghitung laju pertumbuhan, jumlah traktor pada tahun 1987 dan 1988 diasumsikan sama dengan rata-rata jumlah tahun 1986 dan 1989.

tetapi juga di dataran tinggi selama penggunaannya memungkinkan.

Jumlah traktor di Propinsi Lampung disajikan pada Tabel 3. Tampaknya jenis traktor yang mula-mula berkembang adalah traktor besar (roda empat). Namun dalam proses perkembangannya jenis traktor yang lebih kecil (roda dua) yang lebih berkembang. Dari tahun 1985-1989 laju pertumbuhan traktor roda dua sebesar 37 persen, sedang traktor roda empat hanya 3 persen per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan jumlah traktor di daerah itu sebesar 21 persen per tahun. Jumlah traktor di daerah Lampung ini relatif sedikit (dibandingkan dengan Jawa Barat misalnya). Namun, tingginya laju pertumbuhan traktor itu mencerminkan minat petani yang begitu besar dalam menggunakan traktor, walaupun penggunaan tenaga kerja ternak masih cukup tinggi disana.

Jumlah traktor di Propinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 4. Jenis traktor yang banyak digunakan di daerah itu adalah traktor yang lebih besar (traktor roda empat). Hal itu disebabkan oleh asal penggunaan traktor adalah dari perkebunan yang ada di sekitarnya, sedangkan traktor yang lebih kecil belum tersedia pada saat itu. Hingga tahun 1988 jumlah traktor roda empat masih lebih banyak dari pada traktor roda dua. Penggunaan traktor besar ini tidak hanya untuk tanaman pangan, tetapi juga untuk tanaman perkebunan.

Namun, dalam proses perkembangannya laju pertumbuhan traktor roda dua jauh lebih besar daripada traktor roda empat. Laju pertumbuhan traktor roda dua dan traktor roda empat masing-masing 11 persen dan 3 persen per tahun (Tabel 4). Ini berarti bahwa minat petani untuk menggunakan traktor yang lebih kecil lebih tinggi dari pada traktor yang lebih besar. Rata-rata laju pertumbuhan traktor di daerah itu sebesar 5,3 persen per tahun.

Perkembangan traktor juga erat kaitannya dengan kondisi areal penggunaannya. Tabel 5 memperlihatkan proporsi luas lahan irigasi yang diolah dengan traktor serta jumlah traktor di ketiga daerah penelitian. Dari tabel itu terlihat bahwa proporsi areal sawah irigasi yang diolah dengan traktor lebih tinggi di Jawa Barat dari pada di Lampung dan Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh rasio penggunaan traktor terhadap lahan sawah yang lebih tinggi di Jawa Barat dari pada kedua daerah lainnya. Proporsi areal sawah yang diolah dengan traktor di ketiga daerah itu, Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara, masing-masing sebesar 23,6 persen; 9,5 persen dan 10,1 persen.

Tingginya proporsi sawah yang diolah dengan traktor di Jawa Barat dibandingkan dengan daerah lain, antara lain didorong oleh perkembangan intensifikasi padi sawah (perbaikan irigasi dan

Tabel 3. Jumlah traktor di propinsi Lampung, 1985 – 1989.

Jenis traktor	1985	1986	1987	1988	1989	Laju pertumbuhan (%)
Traktor roda dua	43	69	115	170	222	37
Traktor roda empat	116	108	114	111	134	3
Jumlah	159	177	229	281	356	21

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lampung (diolah), 1990.

Tabel 4. Jumlah traktor di Sumatera Utara, 1983 – 1988.

Jenis traktor	1983	1984	1985	1986	1987	1988	Laju pertumbuhan (%)
Traktor roda dua	195	177	163	125	254	314	11,0
Traktor roda empat	447	535	578	517	527	577	3,0
Jumlah	642	712	741	642	781	891	5,3

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Utara.

Tabel 5. Luas sawah irigasi dan proporsi areal yang diolah dengan traktor, 1988/89.

Propinsi	Luas (ha)	Jumlah traktor yang tersedia	% luas yang diolah dengan traktor
Jawa Barat	900.032	7.078	23,6
Lampung Sumatera Utara	112.372	356	9,5
	265.496	891	10,1

Keterangan: Diasumsikan kemampuan 1 traktor mengolah tanah sebesar 0,75 hektar per hari dan hari kerja efektif = 40 hari per musim tanam.

penggunaan bibit unggul) yang lebih dahulu berkembang di daerah itu. Teknologi pertanian tersebut menuntut periode pengolahan tanah yang lebih cepat. Selain itu tenaga kerja manusia dan ternak untuk pengolahan tanah semakin langka di Jawa.

Di Jawa, kesempatan kerja di luar pertanian lebih berkembang dari pada daerah lain. Selain itu tingkat upah di luar pertanian lebih tinggi dari pada di pertanian (data P/SE). Hal ini mendorong petani untuk memilih bekerja di luar pertanian. Pengolahan lahan dengan traktor, tidak hanya oleh petani luas, tetapi juga oleh petani sempit. Di Lampung dan Sumatera Utara, pengolahan lahan masih banyak dilakukan dengan tenaga ternak dan tenaga manusia. Selain itu di daerah Lampung penggunaan traktor baru dikenal sejak awal tahun 1980-an.

Aspek lain yang menarik untuk dicatat dari estimasi tersebut adalah proporsi areal yang diolah dengan traktor yang relatif kecil. Dikaitkan dengan kegairahan petani menggunakan traktor dan lamanya mengenal traktor yang telah mencapai sekitar 10 tahun, maka proporsi areal tersebut di atas mengundang pertanyaan. Estimasi itu didasarkan pada dua asumsi, yakni (1) periode pengolahan lahan serentak, dan (2) traktor tidak mempunyai mobilitas antar daerah. Kalau diperhatikan lebih seksama kondisi di lapangan, maka asumsi itu tidak realistis. Oleh sebab itu, perhitungan tersebut dapat dikatakan terlalu rendah sehingga lebih tetap jika estimasi itu dipandang hanya sebagai indikasi bahwa jumlah traktor yang tersedia belum mencukupi kebutuhan.

(b) Mobilitas Penggunaan Traktor

Perkembangan penggunaan traktor dapat pula ditinjau dari mobilitasnya. Mobilitas traktor bisa

terjadi antar kabupaten, bahkan antar propinsi. Tidak jarang terjadi bahwa traktor dari Karawang dibawa ke Lampung untuk mengolah lahan. Traktor dari Sumatera Utara dibawa ke Aceh untuk tujuan yang sama.

Mobilitas traktor yang tinggi itu didukung oleh waktu tanam antar daerah yang berbeda dan ketersediaan informasi jadwal tanam bagi pemilik traktor. Perbedaan jadwal tanam antar daerah selain dipengaruhi oleh iklim juga oleh pengaturan irigasi yang semakin ketat. Disinilah pentingnya peranan agen dalam mencari lahan garapan ke berbagai daerah. Keberhasilan pengusaha (penjual jasa traktor) sangat tergantung pada kemampuan agen untuk mencari lahan garapan sehingga traktor tersebut dapat beroperasi selama mungkin sepanjang tahun. Permasalahan yang sering dihadapi oleh penjual jasa traktor adalah hari kerja efektif traktor yang terlalu pendek. Hingga kini penggunaan traktor selain mengolah lahan sawah dapat dikatakan belum ada. Ini berarti bahwa hari kerja traktor tersebut menjadi terbatas.

Untuk mendapatkan lahan garapan, berbagai usaha dilakukan oleh pengusaha traktor, seperti pembayaran sewa traktor tidak tunai atau membuat persemaian secara gratis setelah panen di lahan petani. Dengan cara seperti ini, pengusaha secara implisit mempunyai kontrak kerja pengolahan lahan dengan pemilik/penggarap lahan. Cara ini banyak ditemukan di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pada daerah tertentu telah terjadi persaingan secara tajam untuk mendapatkan lahan antar pengusaha traktor.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, di daerah-daerah tertentu, seperti di kecamatan Lakbok, Widasari, Karang Ampel, Cikampek, dan Cilamaya, Jawa Barat, daerah operasi traktor telah diatur oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengatur jumlah traktor yang akan beroperasi di suatu daerah sesuai dengan lahan yang tersedia. Misalnya di kecamatan Lakbok terdapat sawah sekitar 6000 hektar. Traktor yang diizinkan beroperasi di sana hanya sebanyak 200 traktor sehingga setiap traktor mendapat jatah lahan seluas 30 hektar per musim.

Kasus di Sumatera Utara menunjukkan bahwa pihak yang menyewakan, selain pihak perkebunan juga pihak swasta yang secara khusus menyewakan traktor kepada petani. Pengusaha swasta yang menyewakan traktor ini tinggal di kota. Misalnya pengusaha traktor di Tebing Tinggi melayani permintaan penggunaan traktor untuk daerah lain

seperti ke daerah Simalungan dan Tanah Karo. Mobilitas traktor antar daerah begitu tinggi berkat jasa agen (calo). Di sinilah letaknya peranan agen yang menghubungkan petani yang akan menggunakan traktor dengan pengusaha traktor melalui operator traktor (Simatupang, dkk., 1989).

Suatu hal yang menarik untuk dicatat dari penggunaan traktor ini adalah bahwa permasalahan traktor itu bukan lagi terletak pada motivasi petani untuk menggunakan atau tidak, melainkan bagaimana menyediakan dan mengatur penggunaannya agar bekerja lebih efisien. Pada saat ini petani yang menggunakan traktor tidak hanya petani luas, tetapi juga petani sempit. Tampaknya petani sempit lebih tertarik bekerja di luar pertanian daripada mencangkul antara lain karena lebih "menarik" dan perbedaan tingkat upah. Selain itu, ada gejala bahwa petani usia muda enggan mencangkul, walaupun kesempatan kerja lainnya tidak tersedia. Dari sini terlihat bahwa penggunaan traktor untuk mengolah tanah dalam usahatani, walaupun skala usahatani itu umumnya sempit mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang.

PENGUSAHAAN JASA TRAKTOR

Dampak introduksi traktor dalam usahatani tidak hanya terlihat dari produktivitas usahatani, tetapi juga dari munculnya kegiatan baru yang terkait dalam usahatani itu. Salah satu kegiatan yang timbul dan menarik untuk dicatat adalah munculnya pengusaha jasa traktor. Hal ini diikuti pula oleh munculnya kelembagaan baru dalam kegiatan pengolahan lahan.

Pengertian pengusaha jasa traktor di sini adalah usaha mendayagunakan traktor itu untuk mengolah lahan pertanian orang lain sehingga diperoleh nilai jasa traktor itu sebagai imbalan terhadap kegiatannya. Pengusaha traktor di sini dapat terdiri dari pemilik traktor atau bukan pemilik. Bukan pemilik berarti dia atau mereka meminjam atau menyewa traktor orang lain dan kemudian digunakan mengolah lahan pertanian untuk memperoleh harga jasa traktor itu. Harga jasa traktor diukur per satuan luas lahan yang diolah sehingga pengaruh perbedaan jenis dan kekuatan traktor terhadap harga jasa traktor dapat diabaikan.

(a) Pola Pemilikan dan Pengadaan Traktor

Di Propinsi Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara sebagian besar traktor dimiliki oleh per-

orangan, dan hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh kelompok tani atau KUD. Pemilikan traktor oleh kelompok tani atau KUD terjadi karena adanya inisiatif kelompok tani tersebut (misalnya di Lampung) dan dapat terjadi karena adanya bantuan pemerintah sebagai media penyuluhan/pengenalan. Pemilikan traktor secara perorangan tidak hanya oleh petani tetapi juga oleh pengusaha bukan petani yang menyewakan traktor.

Akhir-akhir ini, ada kecenderungan bahwa pemilikan traktor tidak hanya dimiliki oleh petani "kaya", tetapi juga oleh petani kecil. Pemilikan traktor oleh petani ini menunjukkan bahwa petani kecil ikut mencari peluang usaha yang mampu memberikan keuntungan. Contohnya di Cikampek, petani dengan pemilikan lahan di bawah 0,5 hektar menjual kerbauanya untuk membeli traktor.

Pengadaan traktor umumnya berasal dari penyalur yang diperoleh secara kredit atau tunai, disamping jual-beli traktor bekas antar petani. Secara umum penyalur traktor masih berada di tingkat kabupaten. Akhir-akhir ini, di Jawa Barat dan Lampung, ada kecenderungan masuknya Bank Swasta (misal Bank Central of Asia) dalam pengadaan traktor secara kredit.

Di Jawa Barat, sebagian besar cara memperoleh traktor adalah secara tunai dari penyalur alat mekanis. Namun ada juga bersifat kredit dari penyalur atau mendapat kredit dari Bank yang nantinya dipakai untuk membeli traktor. Kredit yang diperoleh dari penyalur hanya dilandasi oleh hubungan baik antara petani dengan penyalur traktor. Jangka waktu peminjaman bervariasi dari 2 musim tanam (MT) - 8 MT, dengan persyaratan cukup sederhana atau karena kepercayaan antara petani dengan penyalur. Di Lampung kondisinya hampir sama dengan Jawa Barat. Di Sumatera Utara cara memperoleh traktor tangan secara kredit belum berkembang. Cara pemilikan yang berlaku di daerah ini adalah pembelian secara tunai.

Di Sumatera Utara telah berkembang pengrajin traktor lokal yang membuat traktor yang populer dengan nama "dolat-dolat". Traktor tersebut diminati oleh masyarakat, disamping karena lebih ringan dengan PK yang kecil (4-7 PK) juga harganya relatif murah, yakni sekitar Rp 3 juta - 4 juta. Traktor ini lebih mudah diangkut ke tempat tujuan. Sementara traktor dengan PK yang lebih besar (7 atau 8 PK) harganya antara Rp 5,5 juta - 7 juta dengan rancang-bangun yang dirasakan kurang sesuai dengan selera petani. Traktor dolat-dolat tersebut di atas relatif cocok untuk daerah pedesaan, dimana pemilikan lahan petani relatif kecil.

Untuk mendukung pengadaan traktor itu, kesediaan suku cadang dan perbengkelan di tiap daerah perlu diperhatikan. Ketersediaan fasilitas ini belum memadai di lapang. Pengadaan traktor harus dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan unsur-unsur lain yang terkait. Simatupang, dkk. (1989) menyatakan bahwa keragaan pasar traktor dilihat dari sisi penawaran belum mendukung usaha-usaha traktorisasi di daerah pedesaan.

(b) Pendapatan pengusaha Traktor

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa status pemilikan alat sebagian besar berupa pemilikan perorangan. Status pemilikan ini tentu mempengaruhi cara pengoperasiannya. Dalam pengoperasian traktor yang bersifat perorangan pada umumnya terdiri dari tiga pelaku yang terlibat, yakni (a) pemilik, (b) pengemudi, dan (c) agen/perantara. Peranan pemilik dan pengemudi cukup jelas. Tugas agen adalah untuk mencari lahan garapan yang akan diolah dengan traktor tersebut. Peranan agen ini bertambah penting mengingat di daerah tertentu jumlah traktor sudah cukup banyak sehingga terjadi persaingan antar pengusaha (agen) dalam memperoleh lahan garapan. Hubungan antara ketiga pelaku tersebut biasanya hubungan kekeluargaan, walaupun ada yang hanya didasarkan pada aspek kepercayaan.

Pada pengoperasian traktor bukan milik perseorangan, yakni milik kelompok tani KUD tidak mengenal jasa agen. Fungsi agen dilakukan oleh anggota kelompok. Pemilikan traktor secara berkelompok ini terdapat di Lampung dan Sumatera Utara, sedangkan di Jawa Barat tidak ditemukan.

Pemilikan traktor secara berkelompok ini kurang berkembang karena masalah manajemen keuangan dan pemeliharaan.

Perkembangan traktor tidak lepas dari keuntungan yang diperoleh pemilik/pengusaha traktor dan pihak lain yang terlibat dengan penggunaan traktor itu. Kapasitas kerja, pendapatan pemilik traktor dan biaya operasi traktor di daerah Jawa Barat dan Lampung disajikan pada Tabel 6 dan 7. Hal yang sama untuk daerah penelitian Sumatera Utara tidak dikemukakan karena masalah data.

Tabel 6 memperlihatkan bahwa pendapatan pengusaha traktor bervariasi antar daerah (kecamatan) di Jawa Barat. Hal itu, terutama disebabkan oleh besar nilai sewa jasa traktor yang berbeda antar daerah, walaupun faktor biaya tidak dapat diabaikan. Sewa jasa traktor berkisar antara Rp 42.500 – Rp 55.000 per hektar (siap tanam), dengan pendapatan bersih pengusaha traktor sekitar Rp 20.677 – Rp 26.883 per hektar. Ada kecenderungan bahwa sewa traktor itu di daerah pegunungan lebih besar dari pada di daerah dataran rendah. Diduga hal itu erat kaitannya dengan kepadatan traktor dan kemudahan mobilitas traktor yang lebih rendah di daerah pegunungan daripada di daerah dataran rendah. Kapasitas kerja traktor yang diukur dengan luas areal yang diolah per hari di dataran rendah (Karawang dan Indramayu) lebih tinggi daripada di dataran tinggi (Ciamis).

Kapasitas kerja, pendapatan, biaya operasi traktor di Lampung disajikan pada Tabel 7. Sewa traktor berkisar antara Rp 60.000 – Rp 75.000 per hektar (siap tanam). Seperti halnya di Jawa Barat, variasi nilai jasa traktor itu terutama disebabkan oleh besar sewa traktor, bukan oleh perbedaan

Tabel 6. Kapasitas kerja, pendapatan pengusaha dan biaya operasi traktor, MT 1989/90 di Jawa Barat.

Kabupaten/ Kecamatan	PK	Operasi		Pendapat- an kotor (Rp 000)	Biaya operasi*) (Rp 000)	Pendapatan bersih	
		Hari	Ha			Per musim (Rp 000)	Per ha (Rp 000)
Karawang							
1. Cilamaya	10,5	40	40	1800	744,5 (41)	1055,5	26,387
2. Cikampek	8,5	50	27,5	1237,5	677,875(55)	568,625	20,677
Indramayu							
1. Karang Ampel	8,5	30	28	1190	510,6 (43)	679,9	23,856
Ciamis							
1. Lakkok	8,5	50	30	1650	852,5 (52)	806,5	26,883
2. Pangandaran	8,5	30	15	675	344,7 (51)	339,3	22,620

Keterangan:

*) terdiri dari pengemudi, agen/perantara, penyusutan, pemeliharaan/suku cadang, bahan bakar dan minyak pelumas.

Tabel 7. Kapasitas kerja, pendapatan pengusaha dan biaya operasi traktor, MT 1989/90 di Lampung.

Kabupaten/ kecamatan	PK	Operasi		Pendapat- an kotor (Rp 000)	Biaya operasi*) (Rp 000)	Pendapatan bersih	
		Hari	Ha			Per musim (Rp 000)	Per ha (Rp 000)
Lampung Tengah							
1. Trimulyo	8,5	60	30	2250	1067,5 (47,5)	1182,5	39,417
Lampung Selatan							
1. Palas	8,5	50	35	2100	1150,417 (54,8)	949,583	27,131
2. Palas	7,5	50	30	1800	1002,5 (55,7)	797,5	26,583
3. Gadingrejo	8,5	40	34	2210	1097,587(49,7)	1112,413	32,718

Keterangan:

*) terdiri dari pengemudi, agen/perantara, penyusutan, pemeliharaan/suku cadang, bahan bakar dan minyak pelumas.

biaya operasi. Penerimaan bersih pengusaha traktor berkisar antara Rp 26.583 – Rp 39.417 per hektar. Penerimaan ini lebih tinggi dari pada di Jawa Barat. Perbedaan ini diduga antara lain karena kepadatan dan mobilitas traktor yang lebih rendah dibandingkan dengan di Jawa Barat. Selain itu, hal itu erat kaitannya dengan tingkat upah dan ketersediaan tenaga kerja; Di daerah Lampung ketersediaan tenaga kerja lebih rendah daripada di Jawa Barat sehingga tingkat upah menjadi lebih tinggi yang pada gilirannya mengakibatkan nilai jasa traktor lebih tinggi dari pada di Jawa Barat. Fakta menunjukkan bahwa ada traktor dari Jawa Barat, seperti dari Karawang dibawa ke daerah Lampung untuk digunakan di sana.

Daya tarik penggunaan traktor di Lampung tidak hanya menguntungkan dilihat dari pihak pengusaha traktor, melainkan juga dari pihak lain yang terlibat, terutama pengemudi. Tabel 8 memperlihatkan struktur penerimaan para pelaku pengusaha traktor di Lampung dan Jawa Barat. Dari tabel itu terlihat bahwa penerimaan para pelaku pengusaha traktor di Lampung lebih tinggi dari pada di Jawa Barat. Oleh sebab itu adalah logis jika terjadi mobilitas traktor dari Jawa Barat ke daerah Lampung.

Dilihat dari sisi profitabilitas pengusaha traktor, dan dikaitkan dengan ketersediaan traktor yang belum dapat memenuhi kebutuhan, maka pengusaha traktor mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang. Tentu, pengusaha traktor itu harus didukung oleh ketersediaan subsistem lainnya, seperti suku cadang dan perbengkelan di daerah. Hingga kini hal itu belum berkembang di daerah. Selain itu, penggunaan traktor bukan untuk mengolah lahan pertanian perlu dikembangkan, sehingga kekosongan waktu kerja (idle capacity)

traktor dapat diperpendek. Hal ini juga ikut mempengaruhi motivasi petani dan atau lembaga ekonomi desa, seperti KUD untuk mengusahakan traktor.

Tabel 8. Penerimaan bersih pemilik traktor, pengemudi dan agen/perantara pengusaha traktor di Propinsi Jawa Barat dan Lampung, MT 1989/90 (Rp/ha).

Uraian	Jawa Barat	Lampung
Pemilik traktor	24.272 (52,2)	31.333 (48,3)
Pengemudi	9.290 (20,0)	14.581 (22,5)
Agen/perantara	2.320 (5,0)	3.240 (5,0)
Biaya penyusutan ^{a)}	7.480 (16,1)	8.360 (12,9)
Biaya lainnya ^{b)}	3.110 (6,7)	7.292 (11,3)
Jumlah	46.472 (100)	64.806 (100)

Keterangan:

a) penyusutan dihitung berdasarkan asumsi umur ekonomis traktor 5 tahun, dan 1 tahun dapat dilakukan 2 kali musim tanam (MT)

$$\text{Nilai penyusutan} = \frac{\text{Harga beli traktor}}{10 \text{ MT} \times \text{kapasitas pengolahan per musim (30 ha)}}$$

b) terdiri dari pemeliharaan/suku cadang, bahan bakar dan minyak pelumas.

Angka dalam kurung adalah persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

(1) Ketersediaan traktor di daerah penelitian meningkat terus, dengan laju pertumbuhan secara

berturut-turut di Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara sebesar 5 persen, 11 persen dan 5 persen per tahun. Di satu pihak, peningkatan itu merupakan petunjuk adanya keuntungan pengusahaan traktor, di lain pihak juga sebagai petunjuk peningkatan permintaan jasa traktor. Namun tampaknya dengan laju pertumbuhan seperti itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di daerah itu. Ada petunjuk bahwa ketersediaan traktor belum mencukupi kebutuhan di daerah itu.

- (2) Kepadatan dan intensitas penggunaan traktor di Jawa Barat lebih tinggi dari pada di kedua daerah lainnya. Diduga hal itu erat kaitannya dengan ketersediaan kesempatan kerja, lamanya traktor dikenal oleh petani dan kondisi pertanian di daerah yang bersangkutan. Jawa Barat, terutama daerah pantai Utara Jawa merupakan sentra produksi padi yang lebih awal mengadopsi teknologi pertanian yang menuntun kegiatan pengolahan lahan lebih cepat dan serentak. Selain itu, kesempatan kerja di luar pertanian di Jawa Barat yang lebih tinggi dari pada di kedua daerah lainnya ikut mendorong tenaga kerja untuk lebih tertarik bekerja di luar pertanian.
- (3) Peningkatan jumlah traktor tersebut merupakan tuntutan kebutuhan tenaga kerja, bukan menggeser tenaga kerja manusia sehingga keluar dari pertanian. Penggunaan traktor untuk mengolah lahan sudah bersifat umum di kalangan petani. Traktor tidak hanya dimiliki dan digunakan oleh petani-petani luas tetapi juga oleh petani kecil. Mobilitas traktor antar daerah cukup tinggi sepanjang informasi pasar penggunaan traktor tersedia.
- (4) Secara finansial pengusahaan jasa traktor menguntungkan. Dilihat dari sisi pengadaan traktor, hal ini merupakan petunjuk bahwa upaya traktorisasi pertanian mempunyai prospek yang baik dimasa datang. Namun, hingga kini pengadaan traktor belum didukung oleh sarana penunjang yang memadai, seperti ketersediaan suku cadang, perbengkelan dan perkreditan di daerah produksi.

- (5) Dampak positif pengusahaan traktor tidak hanya dalam hal penyediaan tenaga kerja usahatani, melainkan juga membangkitkan kesempatan kerja baru di pedesaan, seperti kebutuhan pengemudi traktor, agen pengguna traktor, perbengkelan dan kios-kios bahan bakar.
- (6) Untuk mendorong pengembangan pertanian yang tangguh, maka mekanisasi pertanian khususnya penggunaan traktor harus digalakkan. Dan agar pelaksanaan mekanisasi itu berjalan lancar, program itu harus didukung oleh kebijakan yang memberikan kemudahan bagi petani/pengusaha jasa traktor untuk memperoleh traktor sesuai dengan kebutuhan dan memberikan informasi yang lebih baik kepada pihak swasta tentang prospek pengembangan mekanisasi pertanian di suatu wilayah. Selain itu diperlukan dukungan kebijakan pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada pihak swasta berpartisipasi dalam jasa traktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagyo, A.S. 1984. Pengaruh Mekanisasi Terhadap Produksi dan Penggunaan Tenaga Kerja Usahatani Sawah di Jawa Barat. *Dalam* F. Kasryno, M. Syam, Y. Saefuddin, S.O. Manurung, dan P. Mundy (eds), *Konsekuensi Mekanisasi Pertanian di Indonesia*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1984. Bogor
- Baharsjah, B. 1991. Kebijakan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian. *Dalam* Eko Ananto dan Ridwan Thahir (Penyunting). *Pengembangan Alat dan Mesin Menunjang Industri Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1991. Bogor.
- Hutabarat, B., dkk. 1990. *Kebijaksanaan Agribisnis Pengolahan Agro Industri dan Mekanisasi Pertanian*. Buku II. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1990. Bogor.
- Sinaga, R.S. 1978. Implication of Agricultural Mechanization for Employment and Income Distribution : A Case Study from Indramayu, West Java. *Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES)* 16(2).
- Simatupang, P., Yusmichad Y., dan Sri Hery Susilowati. 1989. *Agro Industri dan Mekanisasi Pertanian Penunjang Diversifikasi Tanaman Pangan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1989. Bogor.